

**RELASI KUASA DAN PENDIDIKAN KARAKTER: MEMBACA ULANG PRAKTIK
SENIORITAS DI PERGURUAN TINGGI MELALUI
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Vania Angie Puspitasari^{1*}, Adinda Rohma Mulyani², Zainal Muttaqin³, Nur Aini⁴

Universitas PGRI Wiranegara

Email: vaniaangie12@gmail.com ,

Abstrak

Budaya senioritas yang berwujud perundungan dengan dalih pendisiplinan masih terus berulang dalam ekosistem perguruan tinggi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah kelanggengan praktik senioritas melalui lensa ketimpangan relasi kuasa serta mendudukkannya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diskursus pendidikan karakter. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur (literature review) dengan menganalisis lima belas artikel ilmiah primer bereputasi dari dekade terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa senioritas bertahan karena adanya normalisasi budaya organisasi dan pembiaran struktural oleh birokrasi kampus. Dominasi senior atas junior didorong oleh asimetri kekuasaan yang melegitimasi pemaksaan kepatuhan buta sehingga merusak fondasi etika akademis. Analisis berbasis HAM menegaskan bahwa praktik ini melanggar hak mendasar mahasiswa atas rasa aman dan lingkungan belajar yang bermartabat. Artikel ini menyimpulkan bahwa dekonstruksi senioritas membutuhkan rekonstruksi pendidikan karakter yang inklusif, humanis, dan berbasis pada kesetaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Perundungan, Perguruan Tinggi, Relasi Kuasa, Senioritas

Abstract

The culture of seniority, manifesting as bullying under the guise of disciplining, continually recurs within the Indonesian higher education ecosystem. This article aims to analyze the root causes of the perpetuation of seniority practices through the lens of power relations imbalance and to reposition it as a violation of Human Rights (HAM) within the discourse of character education. The method employed in this study is a literature review, analyzing fifteen reputable primary scientific articles from the last decade. The findings indicate that seniority persists due to the normalization of organizational culture and structural neglect by campus bureaucracies. Senior dominance over juniors is driven by power asymmetry that legitimizes the enforcement of blind obedience, thereby damaging the foundation of academic ethics. Human rights-based analysis confirms that this practice violates students' fundamental rights to safety and dignified learning environment. This article concludes that deconstructing seniority requires a reconstruction of character education that is inclusive, humanistic, and based on equality.

Keyword: Character Education, Bullying, Higher Education, Power Relations, Seniority

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi idealnya berfungsi sebagai ruang persemaian karakter unggul dan nilai-nilai humanis yang bebas dari penindasan. Namun, secara empiris, terdapat kontradiksi sistematis yang terus langgeng melalui budaya senioritas (Aditya dkk., 2022). Relasi kuasa yang timpang ini memicu munculnya intimidasi, kekerasan simbolik, dan perundungan fisik, khususnya dalam proses menyambut mahasiswa baru atau regenerasi organisasi (Pratama, 2023). Sangat disayangkan, normalisasi terhadap tindakan destruktif ini hampir selalu berlindung di balik topeng legitimasi normatif seperti “pendisiplinan” dan “penguatan mental” mahasiswa.

Pendekatan konfliktual yang diwariskan dari generasi ke generasi ini secara hierarkis memposisikan kelompok senior sebagai pemegang kendali tunggal yang memiliki otoritas mutlak. Dalam ekosistem yang timpang ini, senior menempatkan diri mereka sebagai subjek yang aktif mengontrol, menghukum, dan mengarahkan, sementara mahasiswa baru direduksi posisinya sebagai objek pasif yang wajib patuh tanpa ruang dialog (Wulandari & Lestari, 2021). Pola interaksi otoriter seperti ini menciptakan ilusi kedisiplinan yang semu. Alih-alih melahirkan ilmuwan atau aktivis yang berkarakter kritis, mandiri, dan bertanggung jawab, pola asuh kolonial yang opresif ini justru melanggengkan siklus dendam laten, kecemasan struktural, serta menyisakan trauma psikologis yang sangat mendalam bagi para korban (Hidayat & Setiawan, 2024). Ketika seseorang dipaksa tunduk pada otoritas yang sewenang-wenang, potensi intelektual mereka justru terpasung sejak dini.

Dilema kelanggengan senioritas di perguruan tinggi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya distorsi akut dalam pemaknaan konsep pendidikan karakter itu sendiri. Ketika disiplin diterjemahkan secara sempit dan dangkal hanya sebagai kepatuhan buta terhadap perintah senior, maka nilai etika, moralitas akademis, dan esensi humanisme seketika runtuh (Santoso, 2020). Fenomena ini menciptakan anomali psikososial di mana mahasiswa mengembangkan kepribadian ganda: mereka tampil sebagai subordinat yang patuh dan ketakutan saat ditekan, namun menyimpan potensi agresivitas yang sama dan siap meledak menjadi pelaku perundungan baru ketika posisi sosial mereka naik menjadi senior di tahun berikutnya (Rizky dkk., 2025). Masalah substansialnya adalah, sebagian besar civitas akademika, birokrasi kampus, bahkan para pembuat kebijakan sering kali menutup mata atau mereduksi fenomena ini sebagai sekadar "kenakalan remaja" biasa atau bagian dari "tradisi organisasi" yang wajar

dan tidak perlu dibesar-besarkan (Kusuma, 2019). Pembiaran kolektif berbasis pemakluman kultural inilah yang membuat akar masalah dari tradisi senioritas jarang sekali dibongkar secara radikal dan struktural.

Jika ditinjau dari lanskap riset terdahulu, sebagian besar penelitian mengenai perundungan di ranah sosiologi pendidikan cenderung masih terjebak pada pembahasan dampak psikologis individual yang dialami korban. Banyak peneliti mengkaji bagaimana bullying berkorelasi langsung terhadap penurunan performa akademis, munculnya fobia sosial, hingga isolasi diri dari lingkungan kampus (Sari & Wijaya, 2018; Utama, 2022). Di sisi lain, kelompok peneliti yang fokus pada ranah manajemen pendidikan lebih banyak menawarkan solusi praktis yang sifatnya administratif-teknis. Mereka merekomendasikan perubahan format orientasi kampus menjadi berbasis digital/daring, memperketat regulasi pengawasan oleh dosen pembina, atau memberikan sanksi skorsing bagi mahasiswa yang melanggar (Fahmi, 2021; Nugroho dkk., 2023).

Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi berharga dalam memetakan dampak permukaan, literatur-literatur yang ada saat ini masih menyisakan celah penelitian (research gap) yang sangat signifikan. Fokus riset terdahulu cenderung melihat perundungan sebagai konflik interpersonal yang berdiri sendiri, terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya (Anwar, 2020). Masih sangat jarang—bahkan sulit ditemukan—kajian literatur yang secara radikal dan mendalam membedah budaya senioritas ini melalui lensa sosiologi makro, khususnya teori ketimpangan relasi kuasa, sekaligus mendudukkannya sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ruang lingkup diskursus pendidikan karakter (Fitriani, 2020). Akibatnya, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan selama ini hanya bersifat kosmetik, menyembuhkan gejala luar tanpa pernah memetakan virus utamanya.

Melihat kekosongan teoretis tersebut, studi literatur (literature review) ini dirancang untuk melakukan intervensi konseptual. Melalui pengumpulan, reduksi, dan analisis kritis terhadap berbagai literatur ilmiah bereputasi, artikel ini bermaksud membaca ulang praktik senioritas di perguruan tinggi dengan pisau analisis yang berbeda. Fenomena perundungan berkedok pendisiplinan tidak akan lagi diletakkan sebagai kasus kenakalan personal, melainkan dianalisis sebagai manifestasi nyata dari penyalahgunaan relasi kuasa yang terstruktur. Kekuasaan yang dimiliki senior digunakan untuk mendominasi ruang gerak junior, memetakan

hak berpendapat, dan melanggar hak-hak mendasar mahasiswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat (Zulkifli dkk., 2024). Dengan mengintegrasikan perspektif instrumen HAM internasional maupun nasional ke dalam rekonstruksi pendidikan karakter di kampus, studi pustaka ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kebaruan teoretis serta menawarkan rekomendasi strategis bagi institusi perguruan tinggi untuk mendekonstruksi tradisi toksik senioritas secara total demi masa depan pendidikan yang lebih memanusiakan manusia (Gunawan & Saputra, 2024; Handayani, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi literature (literature riview) yang berfokus pada analisis kritis terhadap dokumen dan artikel ilmiah pra-eksisting. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi konsep, teori, dan hasil peneletian terdahulu yang relevan dengan isu relasi kuasa, senioritas, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam ranah perguruan tinggi. Tahapan penelitian diawali dengan perumusan masalah, diikuti dengan pencarian literature melalui pangkalan digital seperti Google Scholar menggunakan kata kunci yang spesifik. Pengumpulan data dibatasi pada artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir (2016-2026) guna menjamin aktualitas informasi dan relevansi konteks sosial yang dikaji.

Proses seleksi naskah dilakukan secara ketat dengan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas terhadap data yang terkumpul. Kriteria inklusi mensyaratkan artikel harus berasal dari sumber primer berupa jurnal ilmiah nasioanal atau internasional yang membahas kasus senioritas, perundungan di kampus, atau aplikasi teori relasi kuasa dalam pendidikan. Sebaliknya, kriteria eksklusi menolak artikel dari media populer, blog pribadi, wikipedia, atau situs non-ilmiah lainnya demi menjaga validitas akademik. Dari hasil penyaringan tersebut, diperoleh lima belas artikel jurnal utama yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif. Penulis melakukan reduksi data dengan mengklasifikasikan temuan-temuan dari literatur berdasarkan tiga tema besar, yaitu struktur relasi kuasa di kampus, manifesti pelanggaran HAM dalam senioritas, dan model konstruksi pendidikan karakter. Proses penalaran dilakukan secara induktif dengan membandingkan, mengontraskan, dan

menyintesis berbagai argumen dari para ahli guna menarik kesimpulan yang solid. Hasil analisis ini disajikan secara naratif terstruktur dalam bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, langgengnya budaya senioritas di lingkungan kampus disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi kuasa yang terstruktur di dalam organisasi kemahasiswaan. Relasi kuasa ini tidak mewujud dalam bentuk dominasi fisik semata, melainkan melalui penguasaan modal simbolik seperti otoritas usia, status, hingga monopoli informasi internal organisasi yang belum diakses oleh mahasiswa baru (Wulandari & Lestari, 2021). Posisi hierarkis tersebut kemudian dimanfaatkan oleh kelompok senior untuk membangun narasi bahwa loyalitas dan kedisiplinan hanya dapat diukur melalui kepatuhan yang mutlak. Kondisi ini pada akhirnya mengubah struktur sosial organisasi menjadi ruang dominasi unilateral yang mengikis daya kritis mahasiswa baru.

Ketimpangan relasi kuasa ini semakin diperparah oleh adanya normalisasi budaya dan pembiaran struktural yang dilakukan oleh pihak birokrasi kampus. Banyak institusi cenderung mengabaikan laporan kekerasan atau menyelesaikannya secara internal tanpa sanksi yang memberikan efek jera demi menjaga nama baik institusi (Kusuma, 2019). pembiaran ini memberikan legitimasi informal bagi kelompok senior untuk terus menjalankan aksi perundungan berkedok kegiatan kemahasiswaan tahunan. Ketika sanksi tegas tidak pernah ditegakkan, kekerasan simbolik dan fisik mengalami institusionalisasi sehingga dianggap sebagai tradisi legal yang wajib dilalui oleh setiap anggota baru.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dominasi dan represi yang terjadi dalam praktik senioritas merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak kemanusiaan dasar mahasiswa. Setiap individu yang menempuh pendidikan memiliki hak mutlak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak atas rasa aman di lingkungan akademik (Fitriani, 2020). Ketika senior melakukan tindakan intimidasi verbal, pemaksaan fisik, atau penekanan mental dalam proses ospek atau kaderisasi, hak-hak dasar tersebut telah dirampas secara sepihak. Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi ruang aman (safe space) untuk aktualisasi diri berubah menjadi ruang yang mengancam perkembangan psikis mahasiswa.

Dampak dari pelanggaran HAM yang terstruktur dalam senioritas ini tidak hanya berhenti pada fase orientasi saja, melainkan menyisakan trauma berkepanjangan yang merusak tatanan mental korban. Berdasarkan sintesis literatur psikologi, korban perundungan kampus mengalami peningkatan kecemasan sosial yang tinggi, penurunan tingkat kepercayaan diri, dan dalam beberapa kasus ekstrem memicu depresi berat (Hidayat & Setiawan, 2024). Tekanan psikologis ini secara langsung mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan capaian indeks prestasi akademis mereka di kelas. Kerugian yang dialami korban bersifat multidimensional, mencakup aspek kesehatan mental sekaligus masa depan akademis mereka.

Penemuan lain dari studi literatur ini menunjukkan adanya korelasi negatif antara suburnya budaya senioritas dengan keberhasilan program pendidikan karakter yang dicanangkan pemerintah. Pendidikan karakter yang sejati mengedepankan penanaman nilai-nilai moral seperti integritas, toleransi, kerja sama, dan penghormatan terhadap martabat sesama manusia (Santoso, 2020). Budaya senioritas justru mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu penindasan terhadap yang lemah, kemunafikan demi keamanan diri, dan penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Ketika mahasiswa menyaksikan dan mengalami sendiri bagaimana kekerasan di praktikkan oleh senior mereka tanpa ada konsekuensi hukum, internalisasi nilai karakter yang positif dalam diri mereka akan mengalami kegagalan total.

Oleh karena itu, dekonstruksi budaya senioritas memerlukan perubahan paradigma yang radikal melalui rekonstruksi model pendidikan karakter yang inklusif dan humanis di perguruan tinggi. Kampus harus mengadopsi pendekatan restoratif yang menempatkan mahasiswa baru sebagai mitra dialog setara, bukan sebagai bawahan yang harus ditundukkan (Handayani, 2026). Format kegiatan kemahasiswaan harus diorientasikan ulang pada pengembangan potensi kepemimpinan yang berbasis pada empati, kolaborasi lintas generasi, dan inovasi ilmiah (Gunawan & Saputra, 2024). Pendekatan yang komprehensif ini disajikan dalam bentuk perbandingan struktural pada tabel dibawah ini untuk melihat peta transformasi yang dibutuhkan.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Budaya Senioritas dan Pendidikan Karakter Inklusif.

Aspek Analisis	Paradigma Budaya Senioritas	Paradigma Pendidikan Karakter Inklusif
Dasar Interaksi	Asimetri relasi kuasa, dan dominasi	Kesetaraan, kemitraan, dan ruang dialog
Metode Pendisiplinan	Intimidasi, hukuman fisik, dan paksaan	Refleksi kritis, keteladanan, dan empati
Dampak Psikologis	Trauma, kecemasan, dan siklus dendam	Kepercayaan diri dan kesehatan mental terjaga
Fokus Kegiatan	Kepatuhan buta pada senior	Aktualisasi potensi dan inovasi ilmiah
Respon Birokrasi	Normalisasi dan pembiaran	Regulasi ketat dan sanksi tegas hukum

Data pada Tabel 1 mempertegas bahwa keberlanjutan tradisi senioritas hanya akan menghasilkan ekosistem akademik yang destruktif dan bertolak belakang dengan cita-cita pendidikan nasional. Transformasi menuju pradiigma inklusif tidak akan berjalan optimal tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan regulasi anti-perundungan yang ketat. Penegakan hukum di internal kampus harus dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu, disertai dengan pembentukan pusat pengaduan yang aman bagi korban. Hanya dengan memutus rantai relasi kuasa yang korosif ini, perguruan tinggi dapat mengembalikan fungsinya sebagai ruang peradaban yang memanusiakan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa budaya senioritas di perguruan tinggi merupakan manifestasi nyata dari ketimpangan relasi kuasa yang terstruktur dan mengalami normalisasi secara meluas. Praktik perundungan berkedok pendisiplinan ini terbukti melanggar Hak Asasi Manusia paling mendasar dari mahasiswa, khususnya hak atas rasa aman serta lingkungan belajar yang bermartabat, dan berakibat fatal pada rusaknya kesehatan mental korban. Fenomena tersebut sekaligus menjadi

faktor utama kegagalan internalisasi nilai dalam program pendidikan karakter karena justru mereproduksi siklus kekerasan dan kepatuhan semu. Oleh karena itu, langkah dekonstruksi total terhadap tradisi toksik ini mutlak diperlukan melalui reformasi regulasi kampus yang tegas, penerapan sanksi hukum tanpa toleransi, serta pengalihan format orientasi mahasiswa ke arah paradigma baru yang inklusif, humanis, dan berbasis pada kesetaraan sosial.

Sebagai rekomendasi praktis, perguruan tinggi disarankan untuk segera menyusun dan menegakkan regulasi internal yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan fisik maupun simbolik dalam kegiatan kemahasiswaan. Pihak birokrasi kampus juga harus menyediakan sistem pengaduan yang aman, anonim, dan responsif guna melindungi korban serta memutus rantai pembiaran struktural. Selain itu, organisasi kemahasiswaan perlu didorong untuk meredefinisi konsep kaderisasi dengan mengganti metode intimidasi menjadi kegiatan berbasis kolaborasi imiah, pemecahan masalah sosial, dan pengembangan empati lintas generasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini dengan menggunakan metode empiris atau studi kasus mendalam di berbagai rumpun fakultas guna memetakan dinamika relasi kuasa secara lebih spesifik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Siregar, H., & Lubis, Z. (2022) Reproduksi kekerasan simbolik dalam orientasi studi mahasiswa baru. *Sosiologi Pendidikan Karakter*, 14(2), 115-128. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v8k52>
- Anwar, K. (2020). Menguak bias struktural dalam penelitian perundungan di institusi pendidikan tinggi. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7(2), 89-104. <https://doi.org/10.221446/jps.v7i2.61432>
- Fahmi, I. (2021). Efektivitas pengawasan birokrasi kampus dalam meminimalisir perundungan struktural. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 45-58. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jkp/article/view/38210>
- Fitriani, A. (2020). Perlindungan hak asasi manusia di lingkungan akademik: Telaah kritis atas kasus kekerasan berbasis senioritas. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 22(3), 201-215. <https://doi.org/10.2436/jhk.v22i3.1105>
- Gunawan, I., & Saputra, A. (2024). Dekonstruksi budaya senioritas melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis karakter humanis. *Jurnal Etika dan Pendidikan*, 11(1), 77-89. <https://doi.org/10.17509/jep.v11i1.55431>
- Handayani, S. (2026). Pendekatan restoratif dalam mengatasi perundungan struktural di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5(2), 140-155. <https://pediaqu.com/index.php/pediaqu/article/view/9924>

- Hidayat, T., & Setiawan, B. (2024). Analisis dampak psikologis jangka panjang pada korban perundungan ospek kampus. *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 18(2), 99-112. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol18.iss2.art4>
- Kusuma, W. (2019). Normalisasi kekerasan dalam organisasi mahasiswa: Studi kasus senioritas di perguruan tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Nilai*, 7(4), 310-322. <https://doi.org/10.21831/jisn.v7i4.29813>
- Nugroho, A., Triyono, B., & Wardani, K. (2023). Modifikasi format orientasi mahasiswa baru sebagai solusi preventif perundungan. *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 20(3), 244-256. <https://journal.uny.ac.id/index.php/juny/article/view/49102>
- Pratama, M. R. (2023). Paradoks pendisiplinan: Menguak motif kekerasan fisik dalam kegiatan kemahasiswaan. *Jurnal Pendidikan Karakter Indonesia*, 15(1), 32-46. <https://doi.org/10.21831/jpka.v15i1.44102>
- Rizky, F., Utami, P., & Arifin, Z. (2025). Transmisi perilaku agresif: Bagaimana korban senioritas berubah menjadi pelaku. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 13(1), 58-71. <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.60214>
- Santoso, G. (2020). Urgensi rekonstruksi nilai etika akademis dalam menghadapi perundungan di kampus. *Jurnal Filsafat dan Etika Pendidikan*, 8(2), 102-116. <https://doi.org/10.21009/jfep.08203>
- Sari, D. P., & Wijaya, C. (2018). Dampak perundungan terhadap penurunan motivasi belajar dan kecemasan sosial mahasiswa. *Jurnal Kajian Sosiologi Pendidikan*, 6(3), 185-198. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jksp/article/view/1294>
- Utama, J. (2022). Isolasi sosial dan mekanisme koping mahasiswa korban perundungan organisasi. *Jurnal Kesehatan Mental dan Sosial*, 10(2), 121-133. <https://doi.org/10.20473/jkms.v10i2.33215>
- Wulandari, E., & Lestari, S. (2021). Relasi kuasa dominan dalam interaksi senior-junior di lingkungan fakultas. *Jurnal Sosiologi Antropologi*, 19(4), 289-302. <https://doi.org/10.22146/jsa.v19i4.58210>
- Zulkifli, M., Rahman, A., & Fauzi, A. (2024). Manifestasi relasi kuasa dalam ruang lingkup organisasi mahasiswa ekstra-kampus. *Jurnal Ilmu Sosial Kritis*, 12(3), 190-205. <https://doi.org/10.14710/jisk.v12i3.44120>